

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI WATAMPONE**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
Agama Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

NURUL MU'MINATI IDRIS

NIM: 10100113035

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Mu'minati Idris
NIM : 10100113035
Tempat/ Tgl. Lahir : Poso/ 21 Juli 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Bumi Aroepala Blok C 43
Judul : Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan
Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Samata,.....
Penyusun

NIM: 10100113035



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام, الصلوة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada segenap makhluknya di seluruh alam jagat raya ini. Kita semua menyadari, tanpa Dia kita tiada, tanpa Dia kita bukanlah siapa-siapa dan tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan rahmat-Nya kita semua diciptakan, dengan rahmat-Nya kita menjalani kehidupan dan dengan rahmat-Nya pula kita akan dikembalikan kepada-Nya.

Salawat salam tak lupa penyusun haturkan keharibaan beliau Nabi Besar Muhammad SAW. Seorang sosok manusia paripurna, suri tauladan yang mulia, publik figur yang agung dan pembawa rahmat bagi segenap alam semesta, pembawa risalah yang tak pernah salah dalam menyampaikan dan pembawa amat yang tak pernah khianat terhadap tanggung jawab.

Permohonan ampun atas segala dosa dan khilaf senantiasa kupanjatkan kepada Allah swt. Penghargaan terkhusus kepada kedua orang tua untuk Abunda Drs. H. Idris Rasyid dan Dra. Hj. Nurmiati yang telah melahirkan dan membesarkan aku, terimakasih kepada kalian berdua yang tidak pernah lelah dan tidak pernah mengeluh kepada anakmu ini hanya motivasi dan semangat dari kalian berdua untuk terus belajar dan berusaha untuk melakukan yang terbaiklah yang membuat anakmu ini terus terpacu agar dapat menyelesaikan studi yang dijalani, yang dengan doa serta kucuran keringatnya sehingga ananda dapat menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik baiknya dan semoga pengorbananmu ini mendapatkan Balasan dari Allah SWT.

Ayahanda dan Ibunda, maafkanlah putra semata wayangmu ini karna sampai detik ini ananda belum bisa menjadi orang yang berbakti kepadamu dan berguna serta bermanfaat kepada sesama. Maafkanlah ananda karena sampai detik ini pula belum bisa memberikan yang terbaik bagi kalian serta terkadang air mata kesedihan mungkin masih menitik dari kelopak mata kalian yang indah dan belum bisa membuat kalian tersenyum. Ayahanda dan Ibunda maafkanlah nandamu ini karena sampai detik ini mungkin belum bisa menjadi sosok seperti yang kalian harapkan. Penghargaan juga untuk adik adikku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya, sebagai penuntut ilmu kita berjuang bersama.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik Moril maupun Materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat di selesaikan dengan baik. Karena itu sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima Kasih, pertamanya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Supardin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan saran dengan ketulusan dan kearifan berkenan mengoreksi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik yang membangun serta mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat memperoleh gelar sarjana.
8. Kepada segenap pegawai struktural Fak. Syariah & Hukum dan kepada segenap staf Fak. Syariah & Hukum yang dalam hal ini tidak sempat penyusun tuliskan namanya satu-persatu. Terkhusus Staf Jurusan Peradilan Agama, Kak Sri yang telah banyak membantu penyusun selama penyusun menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada segenap teman-teman Angkatan 2013, teman-teman KKN Angkatan 53, khususnya Peradilan Agama 2013 tanpa terkecuali, terima kasih telah menjadi bahagian dari kehidupan ini, kalian telah banyak menorehkan kenangan manis, suka dan dukanya kehidupan telah kita lalui bersama selama menjadi mahasiswa.
10. Terkhusus untuk teman yang selalu ada saat berbagi suka maupun duka, teman berbagi cerita teman tanpa pamrih untuk Hasnaeba, Irmayanti, dan Nurhaini.
11. Terakhir kepada segenap teman seorganisasi PMII yang telah memberi tambahan pengalaman dan ilmu serta teman-teman baru yang menambah semarak menjadi mahasiswa.

Penyusun sangat menyadari sebagai mahasiswa semester akhir bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana S1. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat di harapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Ada banya kendala, keterbatasan dan hambatan yang mesti penyusun lalui, oleh karena demikian dalam skripsi ini pasti takkan luput dari kesalahan dan kekurangan. Olehnya itu sudah seharusnya penyusun untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan yang terdapat dalam karya tugas akhir ini. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat di harapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala. Amin Ya Rabbal Alamin...



Samata, 23 Maret 2017

Nurul Mu'minati Idris

10100113035

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	E
rror! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	10
B. Sosialisasi Pengelolaan Dana Berdasar Prinsip Syariah.....	13
C. Resiko Keuangan	15

D.	Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah.....	18
----	---	----



E.	Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		42
A.	Lokasi dan Jenis Penelitian.....	42
B.	Pendekatan Penelitian	44
C.	Pengumpulan Data	44
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAANNYA TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH.....		47
A.	Gambaran Umum Daerah Watampone.....	47
B.	Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah	52
C.	Analisis Implementasi Keadilan Yang Diharapkan	57
D.	Langkah-langkah Pengenalan Sistem Prinsip Syariah Kepada Nasabah	61
E.	Langkah-langkah Dalam Mengurangi Resiko Yang Terjadi	62
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		63
RIWAYAT HIDUP		69

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapaun pedoman transliterasi yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i

	<i>Dammah</i>	u	u
--	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bilah amzahterletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

7. Lafz al-Jalalah (الله)

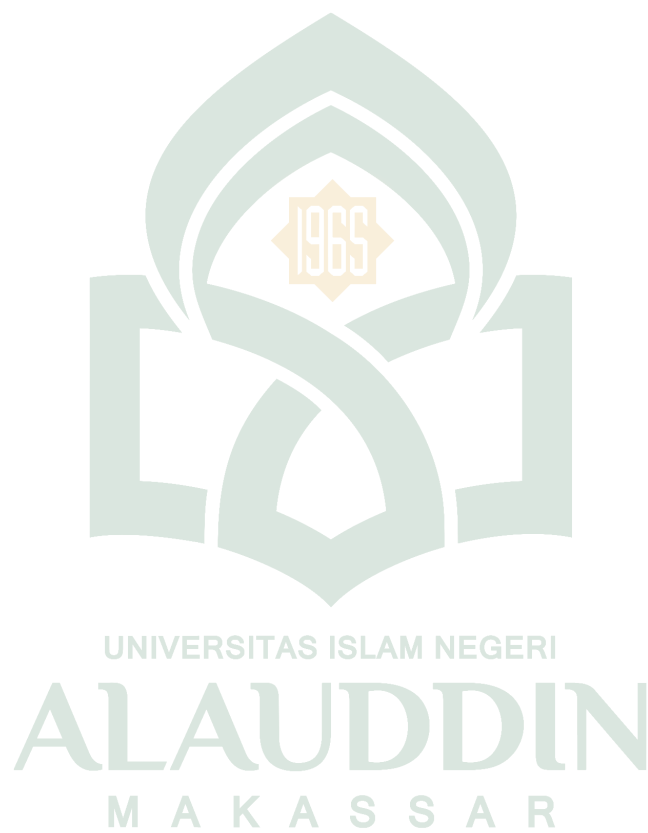
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafi laih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf

A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Nurul Mu'minati Idris

NIM : 10100113035

**Judul : Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah
pada Bank Syariah di Watampone**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip syariah yang diterapkan pada Bank Syariah di Watampone. Selanjutnya ada beberapa sub masalah yang diangkat sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah terhadap pengelolaan dana Mudharabah yang diterapkan di Bank Syariah di Watampone?, 2) Bagaimana langkah sosialisasi Bank Syariah di Watampone dalam mengenalkan pengelolaan dana yang berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah?, 3) Bagaimana langkah antisipasi Bank Syariah di Watampone dalam mengurangi resiko yang terjadi?.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah dan salah satu nasabah bank syariah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dilakukan dengan secara teratur, berkekuatan hukum tetap, dan memberikan rasa aman dan adil kepada nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariah namun, Bank Syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan mengenai teori bank yang berdasarkan Prinsip Syariah kedalam praktiknya karena realisasi belum terwujud dalam praktiknya. Selain itu masih belum transparannya pihak Bank Syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang diakibatkan Sumber Daya Manusianya yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga masyarakat masih belum mengetahui mengenai Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa dalam pelaksanaannya Bank Syariah yang dengan Prinsip Syariah masih belum terlalu tersosialisasikan dengan baik serta implementasi prinsip syariah masih belum merata serta belum transparansinya pihak bank membuat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu. 2) Bank syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah ialah bank yang menanamkan prinsip yang tidak mendiskriminasi bagi kedua belah pihak ada nilai – nilai seperti nilai keadilan yang ditanamkan pada kegiatan perbankan yang dilakukan dan tidak ada unsur gharar atau spekulasi karena hal itu tidak diperkenankan. Selain itu pihak Bank Syariah hanya memberi modal pada usaha-usaha yang tidak diharamkan. 3) Ketika terjadi resiko pada pembiayaan maka ada langkah tempuh yang akan diberikan oleh bank dalam memberikan solusi terbaik sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan diawal, oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada bank syariah harus betul-betul memperhatikan akad yang akan dipakai dan isi dari akad yang diperjanjikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi yang universal datang dengan sifatnya menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek baik itu dalam aspek spiritual maupun aspek materil. Dalam hal ini Islam berarti agama yang mencakup seluruh hal baik itu sosial, budaya, politik dan ekonomi. Islam sebagai agama universal mencakup tiga pokok utama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syariah mencakup ibadah محضة dan ibadah غير محضة diantara ibadah غير محضة yang tidak pernah lepas dari setiap kegiatan manusia yaitu dalam aspek ekonomi.¹ Ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam mengkonsumsi maupun memproduksi dengan sumber daya yang ada.

Bank Syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.² Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama Islam diturunkan namun khusus di Indonesia Keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan beberapa tahun

¹Ekonomi Islam , Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

²Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:Kencana, 2012), h. 427.

belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi tahun 1992. Pada saat krisis 1998, bank muamalat sebagai bank syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sejak saat itu bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian pada krisis global 2008, bank syariah kembali menunjukkan ketahanannya dengan tidak terlalu terpengaruh imbas krisis tersebut. Pembiayaan yang masih di dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis.³ Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab berkembangnya lembaga keuangan syariah hingga sampai saat ini.

Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau divisi usaha syariah. Namun keberadaan lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah dalam perbankan nasional baru dikembangkan sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mulai mengakomodir keberadaan bank syariah. Namun Undang-Undang ini belum memberikan landasan hukum yang cukup

³Sofiniyah Ghufroon, ed., Konsep dan Implementasi Bank Syariah, h. 25.

kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.⁴

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 pasal 2 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁵ Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga menyebutkan mengenai Prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁶

Nilai-nilai Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut

⁴Sofiniyah Ghufroon, ed., *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005) , h.18.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008*, bab I, Pasal 1.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, bab I, Pasal 1.

Prinsip Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah yang disebutkan dalam Undang-Undang adalah larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *haram* dan *zalim* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Salah satunya *mudharabah* Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Meski demikian tetap saja dengan sistem yang sudah diterapkan sedemikian rupa pada bank syariah masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah sebagai mitra kerjasama muamalah menunjukkan adanya suatu kekurangan dan kegagalan yang terjadi. Risiko utama bank syariah adalah kegagalan dalam merepresentasikan kesyariaannya. Risiko tersebut timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan prinsip syariah yang melekat di seluruh transaksi perbankan syariah dan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas syariah. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip syariah bagi bank syariah sangatlah penting. Di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keharusan pemenuhan prinsip syariah berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap

pelaksanaan kepatuhan tersebut. Dimana pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah sesuai semestinya (yang ditetapkan) atau tidak.

Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka menjadi salah satu penyebab mengapa masih kurangnya peminat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan juga selain itu Selama ini industri perbankan kurang fokus terhadap persoalan manajemen risiko, seperti risiko operasional yang muncul akibat tidak ketatnya pengawasan mengawal prosedur standar operasional. BI telah melakukan peninjauan kembali berbagai kebijakan perbankan karena selama ini hanya fokus pada kesehatan bank namun melupakan masalah-masalah operasional.

Oleh karena itu perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimanakah penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap lembaga keuangan syariah terkhusus pada Bank-Bank Syariah sebagai lembaga keuangan pertama yang menerapkan sistem Prinsip syariah apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada atau tidak, karena masih kurangnya representasi bank-bank syariah terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam dalam produk pengelolaan dana bank-bank syariah kepada masyarakat menjadikan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa dan masih meragukan pengelolaan dana mereka kepada lembaga keuangan syariah terkhusus bank-bank syariah. Selain itu keraguan masyarakat terhadap bank-bank syariah dalam menghadapi resiko keuangan yang besar masih belum bisa diminimalisir. Permasalahan dalam suatu lembaga keuangan tidak akan timbul jika tidak dari penerapan pengelolaan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah dengan mengangkat judul “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone”.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan Bagaimanakah pelaksanaan prinsip syariah yang diterapkan di Bank Syariah di Watampone?. Dari rumusan pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat sub masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip syariah terhadap pengelolaan pembiayaan Mudharabah yang diterapkan di Bank Syariah di Watampone?.
2. Bagaimanakah langkah sosialisasi Bank Syariah di Watampone dalam mengenalkan pengelolaan dana yang berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah?.
3. Bagaimanakah langkah antisipasi Bank Syariah di Watampone dalam mengurangi resiko yang terjadi?.

C. *Definisi Operasional*

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini akan dilakukan di Bank syariah di Kabupaten. Bone melalui wawancara langsung kepada

pimpinan Bank Syariah setempat serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting:

1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
2. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem, tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah.
3. Mudharabah ialah kegiatan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

D. *Kajian Pustaka*

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah terhadap bank syariah diantaranya:

Dalam Briefcase Book seri Konsep dan Implementasi Bank Syariah Tahun 2005 mempertegas bahwa lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah adalah

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dimana sistem dan tata cara berdasarkan pada prinsip syariah Islam.

Karnaen A.Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip dalam buku dasar-dasar ekonomi Islam Tahun 1999 mengatakan bahwa Bank Syariah ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam atau bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia oleh Wirdyaningsih, Tahun 2005 disebutkan bahwa jika dalam lembaga keuangan syariah kurang mematuhi ketentuan-ketentuan syariah akan mengakibatkan ketidakmampuan lembaga tersebut dapat bertahan ketika mereka dihadapi krisis

Begitupula dengan peraturan Perundang-undangan RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di dalamnya diatur tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain itu juga diperjelas bahwa selain kegiatan yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 Bank syariah dapat melakukan kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tetap berdasarkan Prinsip syariah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah prosedur pelaksanaan di Bank Syariah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah atau belum.

2. Memberikan gambaran mengenai perbankan syariah yang berdasarkan prinsip syariah
3. Mengungkap bagaimana penanganan bank syariah terhadap resiko yang akan terjadi.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum ekonomi syariah yang memiliki kaitan dengan perbankan syariah sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mengenal dan mengetahui lebih lanjut mengenai perbankan syariah dan prospek kedepannya terhadap perbankan syariah, lebih lanjut bagi praktisi hukum dapat memberikan sumbangsih dan masukan yang bermanfaat dan terkhusus pengadilan agama sebagai lembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah agar kedepannya dapat memberikan suatu keputusan yang adil bagi masyarakat terhadap sengketa ekonomi syariah yang terkhusus melibatkan perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dapat ditelusui dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari dan bangku konotasi dari kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial kata peti atau lemari pada zaman dulu menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan sebagainya. Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja atau counter yang berfungsi sebagai tempat penukaran uang yang juga menyiratkan fungsi transaksi.

Istilah lain yang digunakan dalam bank syariah adalah bank Islam meski secara akademik pengertian Islam dan syariah berbeda akan tetapi secara teknis pengertian bank syariah dan bank Islam adalah sama.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷ Berdasarkan pengertian diatas dapat diberi pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

⁷UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengoperasian bank syariah berdasarkan muamalah serta perjanjian atau akad yang dilakukannya yaitu hubungan antara manusia dengan manusia maupun individu dengan kelompok dalam hal ini meliputi jual beli, piutang gadai dan lain sebagainya, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-qur'an dan Hadis sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih⁸

Larangan memakan riba pada ayat diatas menjadi dasar pemikiran untuk membentuk lembaga keuangan yang bebas riba dan berdasarkan Prinsip Syariah dalam menjalankan hubungan muamalah dalam menjalankan sistem perekonomian.

2. Peraturan Hukum Terkait Bank Syariah

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri), 2012, h. 104.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang memposisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR "Mardatillah" (BPRMD) dan BPR "Berkah Amal Sejahtera". Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Meskipun Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat

3. Undang-Undang No.23 Tahun 1999

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank system*

4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatanusahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah..

5. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah:

- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- b. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

B. Sosialisasi Pengelolaan Dana Berdasar Prinsip Syariah

Manajemen Bank konvensional dan Bank Syariah pada umumnya memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan,

proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah menyangkut Bank Syariah antara lain UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 juga terdapat beberapa hal perbedaan diantaranya yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja serta adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil.

Sistem pemasaran syariah merupakan suatu rangkaian aktivitas produksi barang/jasa dan proses pemesanan produk/jasa kepada konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Jadi setiap kegiatan Bank syariah harus tetap mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan bukan hanya ditetapkan pada produk bank syariah namun juga pada sistem pemasarannya. Dalam dunia pemasaran ada slogan yang menyebutkan “tidak ada sesuatu sampai suatu penjualan itu dibuat” hal ini benar adanya karena pentingnya pemasaran itu untuk melakukan aktivitas sesuai target.

Oleh karena itu dalam suatu usaha perlu adanya para pemasar yang andal yang memiliki sikap dan mental yang jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, sopan, tenang dan berpikir positif secara konsep tidak ada perbedaan khusus antara konsep pemasaran konvensional dengan syariah namun dalam pemasaran syariah lebih menitikberatkan pada nilai dan norma dari segala serangkaian aktivitas pemasaran. Kegiatan promosi produk dan jasa bank lebih banyak dilakukan melalui media massa cetak dan audiovisual seperti majalah, surat kabar dan televisi yang berupa pengadaan pelatihan, promosi penjualan serta penelitian terhadap pengembangan produk¹⁰

⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.111.

¹⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, h. 112.

Jadi dalam pengenalan pengelolaan dan pada bank syariah mereka lebih menitikberatkan pada nilai dan norma pelaku pemasaran itu sendiri melalui ucapan atau dalam istilah disebut *word of mouth* untuk mengambil kepercayaan dari pihak nasabah, atau pihak bank syariah memberdayakan suatu kelompok tertentu yang telah dibekali pengetahuan tentang bank syariah untuk melakukan penetrasi pasar dikalangan mereka sendiri.

Hermawan kertajaya¹¹ dalam buku strategi bisnis bank syariah mengatakan bahwa model pemasaran yang ideal untuk perbankan syariah adalah *consultative selling* dengan tahapan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan nasabah, membangun komunikasi yang interaktif dengan semua pihak potensial, memahami produk dan jasa yang ditawarkan berdasarkan sudut pandang nasabah, mendukung bisnis nasabah dalam berbagai situasi serta membina hubungan baik yang berorientasi jangka panjang.

C. Resiko Keuangan

Pada dasarnya setiap bisnis mengandung resiko tidak terkecuali bisnis bank syariah karena setiap resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan diperoleh resiko dapat diartikan sebagai akibat dari rencana yang telah disusun, karena meskipun sesuatu itu telah direncanakan sebaik mungkin akan tetap mengandung suatu ketidakpastian, ketidakpastian itu sudah merupakan suatu sunnatullah sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS Al-Luqman/31:34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

Terjemahnya:

¹¹Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, h. 136.

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal¹²

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam sudah menjadi hal penting yang selalu menyertai setiap bisnis dalam resiko keuangan untuk itu bagi setiap umat Islam seharusnya selalu berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu resiko bahkan lebih, meskipun bank syariah sebagai lembaga keuangan yang landasan utamanya adalah ajaran Islam akan tetap menghadapi resiko yang disebabkan kecurangan internal maupun eksternal.

Resiko keuangan yang melekat pada perbankan syariah ialah:¹³

a. Resiko Kredit/Pembiayaan

Adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank.

b. Resiko Pasar

Adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang berakibat pada nilai aset yang diperdagangkan.

c. Resiko Operasional

Adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia atau sistem yang mempengaruhi operasional bank.

d. Resiko likuiditas

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri), 2012, h. 415.

¹³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 359.

Adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo terhadap sumber dana yang berkualitas tinggi.

e. Resiko Kepatuhan

Adalah resiko akibat tidak patuhnya atau tidak melaksanakan bank terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku.

f. Resiko Hukum

Adalah resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.

g. Resiko Investasi

Adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Secara spesifik meskipun resiko-resiko diatas merupakan suatu resiko yang terjadi pada setiap usaha perbankan namun bank syariah tidak akan menghadapi resiko yang diakibatkan oleh bunga, karena jika pada bank konvensional ketika tingkat bunga dipasar mengalami peningkatan maka akan berdampak pada meningkatnya resiko yang berpindah kepada bank konvensional.

Berikut adalah karakteristik pengelolaan resiko yang baik:¹⁴

- a. Memahami bisnis perusahaan
- b. Formal dan terintegrasi
- c. Mengembangkan infrastruktur resiko
- d. Menetapkan mekanisme kontrol
- e. Menetapkan batas

¹⁴Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 209.

- f. Fokus pada aliran kas
- g. Sistem insentif yang tepat
- h. Mengembangkan budaya sadar resiko

Veithzal Rivai dalam bukunya, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* menyebutkan ada tiga kerangka dalam manajemen resiko yaitu: identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan pemantauan resiko.¹⁵ Melihat dari adanya resiko yang terjadi maka perlu dipahami bahwa perlu ada langkah dalam menangani setiap resiko yang ada, penanganan resiko ini dalam manajemen perbankan disebut manajemen resiko yang mengandung unsur-unsur kebijakan yang tidak terpisahkan dari prosedur yang ada serta dalam penerapan prinsip mengenal nasabah. Karena dalam hal ini salah satu tujuan manajemen resiko ialah menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dan tetap sesuai pada prosedur yang berlaku.

D. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275

¹⁵Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.12.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya¹⁶

Pada dasarnya riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, karena dianggap sangat membahayakan dan mengandung unsur eksploitasi. Ini ditunjukkan dengan beberapa hal:¹⁷

1. Terjadinya eksploitasi dan pengingkaran terhadap hak-hak antar sesama manusia.
2. Terjadinya pengikisan harta antara kreditur dan debitur
3. Dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong sesama manusia
4. Menimbulkan mental pemboros dan malas bekerja. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong setiap umatnya untuk senantiasa bekerja

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri), 2012, h. 48 .

¹⁷Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Edukasi Profesional Syariah, 2005), h. 21.

keras, dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, dan tentunya kerja dimaknai sebagai jihad dan berpahala.

Riba adalah kelebihan harta dalam sebuah transaksi dengan tidak adanya imbalan atau ganti. Imam Sarkhasi, Qatadah, Raghīb al-Ashfani, dan lain-lain mempunyai pandangan yang sama tentang riba. Menurut mereka termasuk kategori riba jika mengandung tiga unsur, yakni kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Berdasarkan kriteria itu maka setiap transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut dinamakan riba.¹⁸ Karena kondisi tersebut, maka muncul gagasan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang perlunya dibentuk sistem perekonomian yang tidak mengandung unsur riba serta ter-*manage* dengan baik dalam sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Hal ini tidak lepas dari sumbangan pemikir Islam yang *concern* dengan masalah ekonomi Islam mereka adalah Anwar Qureshi, Naiem Shiddiqy, Mahmud Ahmad, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Mith Ghamr Local Saving Bank oleh Dr. Ahmad el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Paisal pada tahun 1963 hingga 1967. Empat tahun kemudian, bank ini membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang dengan berdirinya Mit Ghamr Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di

¹⁸Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, h. 22.

tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967.¹⁹

Perintisan penerapan *profit and loss sharing* sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah yang menjadikan perkembangan sistem keuangan syariah berkembang pesat Namun akibat terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga.

Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank yang lebih berorientasi sebagai bank sosial daripada bank komersial. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim diseluruh dunia, timbulah kesadaran bahwa prinsip-prinsip syariah ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.²⁰

Adapun gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang dilakukan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti

¹⁹ <http://www.ruangdiskusi.com.pdf> (22 Mei 2016) h. 24.

²⁰ Amirudin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 141.

oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rumusan antara lain:²¹

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Jika tidak maka ia termasuk riba.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bebas dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan sistem bunga diperbolehkan beroperasi. Namun harus benar-benar dalam keadaan darurat.

Pada sidang Menteri Luar Negeri negara Organisasi Konferensi Islam yang selanjutnya disebut OKI di Benghazi, Libia pada Maret 1973 usulan tentang perlunya didirikan Bank Syariah diagendakan lagi setelah sebelumnya di Pakistan telah melakukan pertemuan yang mengkaji tentang proposal untuk mendirikan Bank Syariah yang akhirnya disetujui oleh 18 negara Islam. Pada hasil sidang ini juga memutuskan bahwa agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan berdirinya bank syariah sekaligus dibahas tentang ADRT. Selanjutnya pada 1974 diadakan pertemuan Menteri Keuangan Negara OKI di Jeddah

²¹Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, h. 23.

dan disetujui rancangan Pendirian Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) dengan modal awal dua milyar dinar.²²

Keberadaan IDB pada tahun 1975 yang beranggota 22 negara Islam yang bertujuan untuk membantu finansial dalam pembangunan negara anggotanya memotivasi negara-negara Islam lainnya untuk mendirikan bank atau lembaga keuangan syariah seperti Pakistan, Sudan, dan Iran yang mengubah seluruh sistem keuangan tersebut menjadi bebas bunga. Di Eropa tercatat The Islamic Bank International of Denmark sebagai bank syariah pertama di Eropa dan bank-bank besar lainnya seperti Manhattan Bank dan Citi Bank yang memberikan jasa bank sesuai dengan prinsip syariah islam.

Di Indonesia, keinginan untuk mendirikan bank syariah sudah ada sejak tahun 1970 dalam seminar nasional di tahun 1974 maupun internasional di tahun 1976, namun usaha ini mengalami sedikit kendala yaitu, tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya memakai prinsip bagi hasil selain itu hambatan lainnya ialah dianggapnya ada keterkaitan ideologi yang merupakan bagian dari konsep negara Islam. Hal ini baru terealisasi di tahun 1988 karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan.

Kebijakan tersebut telah menginspirasi para tokoh agama di Indonesia untuk segera mendirikan Bank Syariah yaitu suatu perbankan bebas bunga yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia

²²Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekosiana, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007, h. 28.

(MUI) di tahun 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok ini adalah dibentuknya PT Bank Muamalah Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan ditandatangani akta pendiriannya pada 1 November 1991 dengan total modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.

Pada awal berdirinya keberadaan Bank Muamalah belum mendapat perhatian yang optimal, berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mulai mengakomodir keberadaan bank syariah. Namun demikian undang undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan “Prinsip syariah” dalam kegiatan usaha bank. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-Undang ini belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas. Namun meski begitu di tahun 1994 dua tahun setelah didirikannya Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang membuat Posisi Perseroan sebagai Bank Syariah semakin kuat.

Pada tahun 1998 landasan hukum bank syariah menjadi jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mencakup segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya syariahnya dengan mengubah

penyebutan “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “Bank berdasarkan prinsip syariah”.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini telah melahirkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank syariah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor-kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor-kantor cabang syariah. Sedangkan BPR harus memilih salah satu kegiatan, sebagai BPR konvensional atau syariah. Bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
 - b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain. Berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS)
2. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip

syariah maka tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat 2 yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu dalam pasal 11 ditentukan bahwa dalam fungsinya sebagai the leader of last resort Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pengadaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan Perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan dual banking system, mobilitas dana masyarakat dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional disamping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah maka membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan bukan hubungan formal antara debitur dan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional. Selain itu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI/ peraturan bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaa kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain,

bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.²³

Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat

²³Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11.

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).²⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah

1. Pengertian Prinsip Syariah

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

²⁴“Bank Muamalat Profil Bank Muamalat”, situs resmi Bank Muamalat. <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, (29Juni 2016).

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵ Jadi yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip yang digunakan dalam kegiatan perbankan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini DSN-MUI.

Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²⁶ Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan-aturan berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:²⁷

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

²⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bab I, Pasal 1

²⁶Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 20 .

²⁷UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai unsur-unsur yang dilarang dalam kegiatan perbankan telah menjadi indikasi bahwa dalam setiap kegiatan perbankan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diwajibkan dalam setiap kegiatan perbankan.

2. Prinsip Syariah

Sebagaimana bank konvensional bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana namun sebagaimana yang diketahui sebagai bank syariah segala kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana

serta pelayanan jasa bank syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam ketentuan pokok hukum Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme alamiah yang tidak mengandung riba, gharar maysir, riba dan zalim. Sementara menurut tariq ashraf produk-produk keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah ialah etis, sosial, religius dan keadilan.²⁸ Menurut Muhammad prinsip syariah dalam perekonomian didasarkan pada lima hal yaitu Ketuhanan, Keadilan, Kenabian, Pemerintahan dan Hasil atau keuntungan²⁹ yang dimana kelima fondasi ini menjadi acuan dalam setiap kegiatan perekonomian terkhusus perbankan. Ada juga pemikir ekonomi syariah yang menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu mahmud muhammad babali dengan menetapkan persaudaraan, berbuat baik, memberi nasihat, teguh pendirian dan bersikap takwa sebagai prinsip syariah.³⁰ Dengan banyaknya prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam hal perbankan syariah ada prinsip yang sangat diutamakan dalam aspek muamalah terutama perbankan syariah yaitu keadilan.

a. Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum

²⁸Surtan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 125.

²⁹Muhammmad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UGM, 2004), h. 95.

³⁰Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 37

alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Adil adalah salah satu prinsip dalam muamalah Islam. Prinsip keadilan menjadi dasar dari muamalah dalam Islam karena Islam adalah rahmatan lil'alamini bagi seluruh makhluk. Dalam kenyataan, prinsip keadilan yang tidak diterapkan dalam bermuamalah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa bagi pemilik modal dengan pekerjanya, kaum kaya dengan kaum miskin dan penguasa dengan rakyatnya. Ketidakadilan menyebabkan rahmat Allah SWT tidak lagi bisa terbagi secara merata di muka bumi. Rahmat Allah SWT menjadi terbagi secara tidak merata. Ada sebagian menikmati dengan penuh kelimpahan tetapi di lain sisi ada yang tidak mendapatkannya.

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an kurang lebih seribu kali³¹ setelah kata *Allah* dan *Ma'rifah*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Adil menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya buku pintar ekonomi syariah mengatakan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada porsinya.³² Karena itu keadilan merupakan dasar serta tujuan dalam segala tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan.

³¹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 20.

³²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 24.

Karena dalam Islam manusia diajarkan dan didik bagaimana dapat bertanggung jawab kepada keluarga, kepada para fakir miskin bahkan terhadap negara, dan hal ini juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dengan karakteristik sifat Islam yang Dinamis dan elastis maka Islam meberikan solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern dengan campur tangan pemerintah dan Undang-Undang. Terlebih lagi saat ini ekonomi syariah semakin berkembang baik dari segi keilmuan maupun dari segi aplikasinya.

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ ۝۸

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan³³

Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan betapa suatu keadilan sudah menjadi perintah penerapan keadilan yang ada bukan hanya pada tiap individu namun juga pada tingkat interaksi sosial pun juga harus diimplementasikan hingga tercapainya suatu keadilan yang merata. Begitupula jika ia dikembalikan pada tingakat ekonomi yang mana keadilan itu dapat diterapkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri), 2012, h.109 .

Quraish shihab pun memaklumkan bahwa, salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Berbuat baik melebihi keadilan seperti memaafkan kepada yang bersalah atau memberikan bantuan kepada yang malas akan dapat menggoyahkan sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat. Ada empat makna keadilan yang diungkapkan oleh para pakar agama: Pertama, adil dalam arti persamaan (hak manusia). Kedua, adil dalam arti seimbang (kesimbangan dan kesesuaian bukan lawan kata keadilan). Ketiga, adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya (antara hak sesama manusia). Dan yang keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi³⁴

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Ibnu Taimiyah bahkan sampai mengatakan bahwa “Tuhan akan mendukung pemerintahan yang adil walaupun kafir dan Tuhan tidak akan mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam.”³⁵ Dari indikasi ini dapat dilihat bahwa pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermuamalah itu sangat diperlukan, baik itu adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah maupun makna adil yang lainnya. konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti

³⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2007), h.152-155.

³⁵ Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Pres, 2014), h.43.

mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Keadilan atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan modal karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memberikan keterangan bahwa di dalam Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara manusia dalam batas-batas wajar yang adil yang dimana dalam hal ini secara tidak langsung Islam tidak mengakui sistem ekonomi kaum sosialis yang menyatakan bahwa hak—hak individu adalah sama, adanya orang kaya dan miskin merupakan suatu sunnatullah yang menjadikan adanya manusia yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

Keadilan dalam praktek bank syariah diterapkan melalui beberapa instrumen. Muhammad mengemukakan tiga instrumen utama keadilan dalam praktek bank syariah yaitu seperti zakat, bagi hasil dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal bagi hasil dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dapat ditemukan dalam mudharabah sebagai bentuk produk perbankan syariah.

b. Mudharabah

Untuk perjanjian bagi hasil mudharabah telah dikenal oleh ummat Islam sejak jaman Nabi Muhammad S.A.W. sewaktu Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, Rasulullah telah melakukan perjanjian atau akad mudharabah dengan Siti Khadijah yang kemudian hari Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah yang pertama. Dalam prakteknya perjanjian mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad S.A.W. saat itu Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keluar negeri.

Dari sejarah tersebut dapat dipahami bahwa Khadijah adalah pemilik modal 100 % dan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad mudharabah merupakan persetujuan perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain.

Mudharabah menurut bahasa berasal dari kata ضرب yang artinya memukul atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Berasal dari kata قرض yang berarti sepotong karena pemilik modal mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.³⁶

Mudharabah menurut istilah fikih adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.³⁷ Atau sebuah akad kerjasama antar pihak yaitu

³⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 529.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi (mudharib) pengelola³⁸. Jadi mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pihak yang memiliki modal dan pengelola modal yang segala ketentuan dalam usaha itu sudah disepakati lebih awal terlebih dahulu.

Landasan hukum mudharabah adalah Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa'/4:

29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 171.

Dalam konsep perjanjian mudharabah dalam fiqh muamalah, ulama berbeda pendapat tentang rukun dari mudharabah tersebut, pada pandangan ulama Hanafiyah bahwa rukun perjanjian mudharabah tersebut hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah itu adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Orang yang berjanji (berakad), yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola usaha).
- 2) Modal (maal).
- 3) Shighat.

Bagi ulama Syafi'iyah selain tiga hal yang di atas, menambah rukun mudharabah tersebut jadi lima hal yaitu:

- 1) Orang yang berjanji (berakad), yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola usaha).
- 2) Modal (maal)
- 3) Shighat.
- 4) Kerja atau usaha
- 5) Keuntungan atau laba

Penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *Entrepreniur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang

³⁹Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 227.

telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah/mudharib atau mudharib yang membutuhkan dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Maka mekanisme daripada pembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan mudharib.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/mudharib, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal selama bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito dan giro sama dengan prinsip syariah wadi'ah mudharabah juga diatur dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dan dalam bentuk deposito diatur dalam fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Adapun isi ketentuan ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah berdasarkan fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Mudharabah terbagi kepada dua bagian yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah⁴¹

1. Mudharabah muthlaqah

yaitu perjanjian kerjasama antar shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara' dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad
- b) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib

⁴¹Shofiniyah Ghufroon, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h.39.

mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya.

- c) Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
- d) Pemilik modal dalam bentuk tabungan mudharabah dapat mengambil dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- e) Deposito mudharabah hanya dapat diacairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6, atau 12 bulan.

2. Mudharabah muqayyadah

Yaitu perjanjian atau usaha kerjasama yang dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul mal selagi dalam bentuk yang dihalalkan. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi bank (mudharib) baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya.

Ketentuan mudharabah muqayyadah sebagai berikut:

- a) Bank sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- b) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah.

- c) Bentuk investasi nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus perkasus.

Mekanisme pembagian keuntungan atas investasi mudharabah tergantung pada kinerja bank dalam hal ini ada dua jenis bentuk mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet.⁴² Dengan dibaginya mekanisme pembagian keuntungan seperti ini cukup membuktikan bahwa penerapan prinsip keadilan sangat ditekankan dalam pelaksanaan mudharabah ini setiap individu masing-masing memiliki hak dalam menerima keuntungan yang telah disepakati.



⁴²Shofiniyah Ghufon, Konsep Dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta:Renaissance, 2005), h. 40.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Watampone dengan objek penelitian Bank Syariah, untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan prinsip syariah yang terdapat di bank syariah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kelemahan bank syariah sehingga menyebabkan kurangnya peminat masyarakat terhadap perbankan syariah dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai pelaksanaan prinsip syariah terhadap perbankan syariah di Watampone.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian field research yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan prinsip syariah terhadap perbankan syariah di Watampone. Kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian field research, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Dengan demikian Penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa responden yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait. Data ini penulis peroleh dari dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalha penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman

informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.⁴³ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pegawai dilingkungan Bank Syariah Watampone guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip syariah terhadap perbankan syariah di Watampone.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik yang berupa buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen. Disini yang penulis maksud adalah data-data yang didapatkan dari Bank Syariah di Watampone. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan

⁴³Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

dibahas. Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian yakni dengan merujuk pada teori-teori setelah itu dikaitkan dengan kenyataan dilapangan. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah normatif dan yuridis dalam pelaksanaan prinsip syariah terhadap perbankan syariah di Watampone.

BAB IV

PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAANNYA TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

A. Gambaran Umum Daerah Watampone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Berdasarkan Bone Dalam Angka Tahun 2016 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, bahwa Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 742.912 jiwa yang terdiri atas 354.502 jiwa penduduk laki-laki dan 388.410 jiwa penduduk perempuan.

1. Kondisi geografis

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- 1) Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- 2) Timur : Teluk Bone
- 3) Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- 4) Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi $4^{\circ}13'$ - $5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42'$ - $120^{\circ}30'$ Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara $24,4^{\circ}\text{C}$ - $27,6^{\circ}\text{C}$.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Moonson dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Moonson memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

2. Adat dan Budaya Kabupaten Bone

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana Masyarakat kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam. Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama

Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya.

Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Disamping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Dibidang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional maka Pemkab Bone untuk Sektor Pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan. Oleh karena itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatann SDM agar menguasai lptek. Peningkatan SDM tersebut mempunyai nilai strategis karena merupakan prasyarat mutlak bagi Daerah Kabupaten Bone untuk mampu bersaing dalam Era Otonomi Daerah ini.

3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2014,terdapat 530.166 penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, yang termasuk angkatan kerja sebanyak 338.988 jiwa. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)K Kabupaten Bone adalah 63,94 persen semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bone sebesar 4,96 persen. TPT di wilayah perkotaan (5,35 persen) tampak lebih tinggi dari wilayah perdesaan (4,88 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tersedia kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.

Penduduk bekerja merupakan kekuatan ekonomi keluarga dan wilayah. Terdapat dua kondisi bagi seseorang yang bekerja, yaitu mereka berhasil memenangkan kompetisi dalam meraih pekerjaan atau mereka yang mempertahankan hidupnya dengan bekerja walaupun serabutan. Saat ini terserapnya penduduk kerja ke lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pendidikan tahun 2014, 56% penduduk bekerja Bone berpendidikan SD ke bawah. Hanya 10% penduduk bekerja berpendidikan Diploma, Sarjana dan jenjang yang lebih tinggi.

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk tergolong dalam kelompok kedua yaitu mereka yang mempertahankan hidup dengan bekerja apapun jenisnya. Berdasarkan lapangan usaha, mayoritas penduduk bekerja di Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian. Hal ini selaras dengan keadaan alam Bone yang merupakan basis pertanian Sulawesi Selatan. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah perdagangan (17,94 persen). Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat perbedaan persebaran lapangan usaha antara penduduk bekerja laki-laki dan perempuan. Sebagian besar penduduk laki-laki bekerja di sektor pertanian dan lainnya. Sementara penduduk perempuan, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Untuk sektor perbankan daerah Bone hanya berpusat dan berada di Ibukota yaitu Watampone terdapat tiga Bank Syariah yang beroperasi di Watampone yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah untuk lokasi penelitian Penulis hanya meneliti pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah karena pada Bank Muamalat pihak Bank Muamalat sendiri masih belum melakukan pembiayaan mudharabah ini.

B. Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, yang mana di dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka, atau perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara keahlian maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.

Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Watampone tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun

⁴⁴Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II, BAB I, Pasal 20.

dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri. Tahapan proses pembiayaan diawali dengan:

1. Pemenuhan syarat dan rukun
 - a. Ada pemilik dana yang cakap hukum
 - b. Ada pengelola yang cakap hukum
 - c. Ada modal (uang/barang) yang dibayar tunai yang jelas jumlah dan jenisnya
 - d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
 - e. Ada akad
 - f. Ada kesepakatan bagi hasil
 - g. Ada usaha yang dibiayai halal
2. Proses pembiayaan
 - a. Identitas diri dan pasangan
 - b. Kartu keluarga dan surat nikah
 - c. Copy rekening bank 3 bulan terakhir
 - d. Akte pendirian usaha
 - e. Identitas pengurus
 - f. Legalitas usaha
 - g. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - h. Past performance 2 tahun terakhir
 - i. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
 - j. Data obyek pembiayaan
3. Analisa pejabat bank

- a. Wawancara
 - b. Kunjungan lapangan (*call visit*)
 - c. Laporan kunjungan (*call report*)
4. Persetujuan pembiayaan
 5. Bila pihak bank setuju maka pihak pejabat bank membuat persetujuan prinsip bersyarat (*officer letter*)
 6. Bila nasabah setuju terhadap *officer letter* maka akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan
 7. Pencairan pembiayaan
 8. Monitoring
 9. Pelunasan

Dilihat dari banyaknya proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan ini dapat membuktikan bahwa cukup untuk diberikan dan dilanjutkan melakukan Namun pada satu sisi, sangat sulit untuk menentukan amanah atau tidaknya calon nasabah/mudharib tersebut sebagaimana yang dikriteriakan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sebab amanah itu tidak bisa diukur dengan bagus dan aktifnya pelaporan yang diberikan nasabah/mudharib.

Dalam pelaksanaannya Bank syariah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasan dalam kegiatan perbankan yaitu:

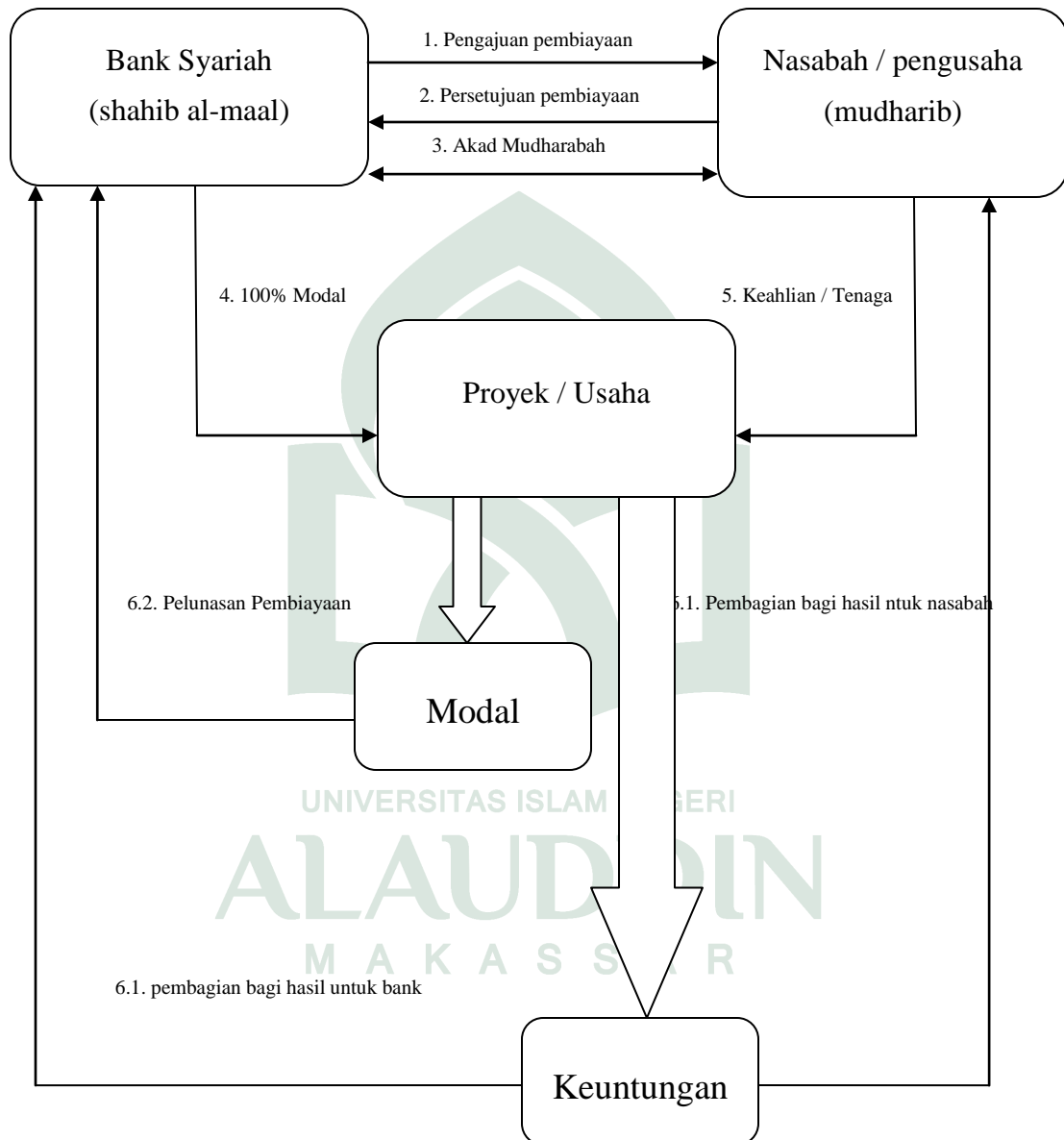
- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana

- c. Islam tidak membolehkan “menghasilkan uang dari uang” uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik
- d. Unsur *ghrarar* (ketidakpastian, ketidakjelasan) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Seperti usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dalam pembagian keuntungan atau *nisbah* dari pihak bank telah menentukan besar kecil pembagian keuntungan atau proporsi keuntungannya dan jelas persentasenya sebagai berikut:

NASABAH	BANK
51%	48%
50%	46%
60%	40%

Untuk lebih jelas berikut bagan mengenai transaksi Pembiayaan Mudharabah



Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Selain itu *Break Even Point (BEP)* harus jelas, karena BEP menggunakan sistem *revenue sharing* dengan *profit sharing* berbeda.

Dari hasil wawancara dari salah satu pegawai Bank Syariah mereka mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara *revenue sharing* dan *profit sharing* ialah *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan *profit sharing* adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.⁴⁵

Jadi untuk pembagian keuntungan pada bank syariah belum ada kepastian apakah akan memakai *Revenue sharing* atau *profit sharing* dalam hal pembagian keuntungan hal ini akan diputuskan dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh terhadap hasil usaha tersebut.

C. Analisis Implementasi Keadilan Yang Diharapkan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Berdasarkan nilai prinsip syariah yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah pada bank syariah, merupakan titik acuan yang menjadi

⁴⁵Ana (25 tahun), Customer Service, wawancara, Watampone, 11 Maret 2017.

perbedaan yang sangat urgen antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam kehidupan bermuamalah, keadilan sebagai salah satu nilai dasar kekuatan hukum merupakan landasan dalam membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu akad atau perjanjian, kesepakatan yang harus dibuat oleh bank haruslah kesepakatan yang seimbang hak setiap pihak sebagai bentuk keadilan.

Keadilan bukanlah sesuatu yang hanya dianggap sebagai sebuah nilai belaka akan tetapi keadilan itu haruslah diimplementasikan sehingga menjadi sebuah bentuk yang nyata pada pembiayaan mudharabah sebagai bentuk bagi hasil yang seimbang, dengan segala hal baik keuntungan maupun tanggungan kerugian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Keadilan yang diterapkan terlihat sangat mencolok ketika penentuan perjanjian bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian, pada bagian syarat dan rukun akad, akan tetapi kesepakatan tersebut harus dilihat dan dianalisis terlebih dulu oleh bank dari segi bisnis yang diajukan dan manajemen resikonya sehingga pihak bank dapat memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi kedepannya. Penetapan mengenai bagi hasil ini sudah berdasarkan perhitungan sebelah pihak saja dari hal ini saja sudah nampak ketidakseimbangan dalam pembuatan kesepakatan karena adanya unsur satu pihak saja sudah membuat nilai keadilan itu berkurang yang seharusnya diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian.

Pada konsep keadilan memberikan gambaran titik awalnya dari format akad yang dibuat harus memberikan rasa keadilan dengan adanya proses tawar-menawar yang artinya ada proses transparansi pada akad kontrak yang dibuat hingga kedua

belah pihak lebih mengetahui proporsi hitungan bagian yang akan dibagikan dengan menggunakan sistem *profit sharing* atau *revenue sharing*. Jika ditelaah lebih jauh dalam praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan bagi hasil yang telah jelas ditentukan oleh pihak bank diawal perjanjian membuat nasabah tidak memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan keuntungan yang akan dibagi pada akhirnya nasabah secara mau tidak mau akan mengikuti prosedur yang telah dicantumkan terlebih dahulu, selain itu faktor kurang pahamiannya nasabah mengenai pengetahuan tentang proses bermuamalah menjadi tambahan poin bahwa masih adanya pihak yang belum mendapat keadilan secara merata.

Secara hukum syar'i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan pihak bank cukup transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah karena Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah. Bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun. Selain itu karena Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:⁴⁶

1. Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
2. Nominal deposito nasabah
3. Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank
4. Jangka waktu deposito

Dengan pembagian *profit sharing* dan *revenue sharing* maka terpampang jelas bahwa dalam Bank Syariah terkandung dimensi keadilan dan pemerataan, lain halnya dengan Bank Konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan

⁴⁴Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 79.

bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya apabila terjadi kerugian terhadap usaha yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (Bank), sementara dalam bank syariah kelayakan usaha yang akan didanai menjadi jaminan oleh karena hal itulah mengapa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Namun jika pada kenyataannya berdasarkan narasumber yang saya wawancarai sebagai salah satu nasabah pada bank syariah pak Salim Said mengatakan bahwa sulit untuk mengajukan pembiayaan mudharabah kepada bank syariah secara fakta beliau pernah mengajukan namun tidak diterima oleh pihak bank syariah karena terlalu sulitnya proses yang dilalui dan beliau bukan nasabah pada bank yang bersangkutan⁴⁷ hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kepada orang yang meminta pembiayaan.

Dari wawancara dengan salah satu customer service Secara prinsip mudharabah yang syar'i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan mudharib maka murni ditanggung pemodal, dalam hal ini adalah bank. mudharib tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut. Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam.⁴⁸ Perlu diketahui, bahwa ternyata hampir semua bank mempersyaratkan pada akad mudharabah semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak.

⁴⁷ Salim Said (53 tahun), Pemilik Percetakan Offset, wawancara, Watampone, 10 Maret 2017.

⁴⁸ Efi Hardianti (25 tahun), Teller, wawancara, Watampone, 11 Maret 2017.

Melihat hal ini ini tidak dapat dikatakan sebagai mudharabah karena tidak ada keadilan dalam menanggung kerugian, sama halnya ialah pihak nasabah hanya meminjam dari bank dengan memberikan jaminan berupa aset yang dapat diambil jika menasabah mengambil kerugian. Hal ini tidak lagi sejalan dengan konsep syari'ah karena konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama baik baik dalam mebagi keuntungan atau sebaliknya, hal ini dapat dimulai dengan transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, amanah, bila semua hal itu terpenuhi maka akan menghasilkan perjanjian dengan kualitas terbaik.

D. Langkah-langkah Pengenalan Sistem Prinsip Syariah Kepada Nasabah

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah untuk mempersentasikan prinsip syariahnya pihak bank hanya melakukan dalam lingkup internal, berikut langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengenalkan sistem prinsip syariah:

1. Melakukan pembukaan forum antara nasabah dan bank
2. Memperkenalkan produk –produk yang ada dalam bank itu sendiri
3. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan umpan balik.

Dapat dilihat jelas bahwa untuk langkah sosialisasi yang diambil oleh pihak bank masih sekedar lingkup internal saja, pihak bank akan memberikan sosialisasi hanya kepada nasabah dan calon nasabah pihak bank belum melakukan kegiatan eksternal guna mensosialisasikan sistem syariahnya berupa pengadaan seminar, ataupun promosi secara langsung dan masih kurangnya promosi melalui media cetak ataupun media online. Oleh karena itulah mengapa bank syariah masih belum mampu menarik nasabah secara massal untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah

meski pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan nasabah masih ada meski tidak terlalu signifikan.

E. Langkah-langkah Dalam Mengurangi Resiko Yang Terjadi

Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (*over macht*), sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dalam hal ini Bank, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah atau *mudharib* dalam mengelola usaha, penyelewengan penyalah-gunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah/ *mudharib*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap muamalah apalagi terhadap muamalah bank yang menyangkut tentang uang pasti akan menghadapi yang namanya resiko. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26) menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang difasilitasi⁴⁹

Dalam fiqh Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada nasabah/*mudharib*, akan tetapi bank-bank syariah pada umumnya meminta berupa bentuk jaminan, hal ini dilakukan pihak bank syariah untuk menegaskan jaminan tersebut ada hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang diberikan

⁴⁹Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah BAB I Pasal 1.

kepada nasabah/mudharib itu adalah pada umumnya dana yang dihimpun dari masyarakat luas.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad⁵⁰

Berdasarkan dari kedua aturan diatas yang telah disebutkan jelas bahwa jaminan atau agunan hanya sebagai langkah antisipasi akan tetapi dalam prakteknya pada Bank Syariah ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan maka jaminan atau agunan yang menjadi jaminan pada saat akad akan menjadi milik bank hal ini tidak lagi menjadi adil bagi pihak yang rugi karena pada praktiknya akan sulit menemukan solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan resiko dan pada akhirnya jaminan yang dijaminakan akan berpindah hak kepemilikan dalam menebus modal biaya yang telah dipakai dan ini tidak lagi sesuai dengan langkah yang ditempuh agar resiko yang terjadi tidak menimbulkan dampak besar atau istilah lain langkah antisipasi yang diambil ialah:

1. Melakukan kembali sistem sosialisasi dalam peninjauan terhadap permasalahan yang dihadapi
2. Menyampaikan peringatan berupa peringatan lisan kepada nasabah

⁴⁶Dewan Syariah Nasional, Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

3. Memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah
4. Memberikan keputusan dan melanjutkan transaksi dalam pelelangan barang jaminan.

Untuk nasabah yang mengalami kerugian pada poin ketiga diatas menunjukkan bahwa pihak bank akan memberikan solusi yang terbaik namun pada akhirnya ketika tidak tercapai kesepakatan maka keputusan selanjutnya ialah melakukan pelelangan pada barang jaminan, secara tidak langsung pada teorinya mengatakan jaminan merupakan sesuatu yang dijamin agar pengelola usaha yang mengalami resiko tidak lari dari pembayaran utang bukan untuk membayarkan utang ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah
2. Dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi
3. Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang mumpuni dan profesional di bidangnya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai mudharabah ini

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian dapat memberikan saran bagi masyarakat yang ingin memahami mengenai bank syariah:

1. Bahwa dalam pelaksanaannya bank syariah melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang berlaku namun, masih belum terlalu tersosialisasikan dengan baik serta implementasi prinsip syariah masih belum merata serta belum transparansinya pihak bank membuat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu
2. Bank syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah ialah bank yang menanamkan prinsip yang tidak mendiskriminasi bagi kedua belah pihak ada nilai – nilai seperti nilai keadilan yang ditanamkan pada kegiatan perbankan yang dilakukan dan tidak ada unsur gharar atau spekulasi karena hal itu tidak diperkenankan. Selain itu pihak Bank Syariah hanya memberi modal pada usaha-usaha yang tidak diharamkan.
3. Ketika terjadi resiko pada pembiayaan maka ada langkah tempuh yang akan diberikan oleh bank dalam memberikan solusi terbaik sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan diawal , oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada bank syariah harus betul-betul memperhatikan akad yang akan dipakai dan isi dari akad yang diperjanjikan karena antara Bank Konvensional dan Bank Syariah jika ada permasalahan atau sengketa maka semuanya akan kembali pada akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Ed. 5. Cet. 10 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Bank Muamalah. *Profil Bank Muamalah*. Jakarta: Juni, 2016.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Dua Sukses Mandiri, 2002.
- Ekonomi Islam , *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003.
- <http://www.ruangdiskusi.com.pdf>.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung:1986.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekosiana, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta: 2007.
- K, Amirudin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Makassar: Alaudiin University Press, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: 2016.
- Mulyana, Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

- Renaissn Anggota IKAPI. *Edukasi Profesional syariah Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaissn, 2005.
- . *Sistem dan mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaissn, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta; Gama Press, 2010
- . *Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta; Gama Press., 2010
- . *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta; Gama
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL, Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah*. Cet. 7. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: 2003.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

LAMPIRAN

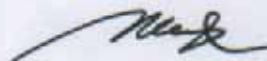


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi saudara Nurul Mu'minati Idris, NIM: 10100113035, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone" memandang bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil). Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

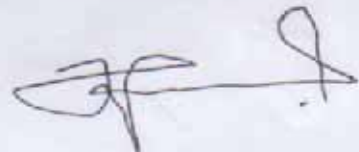
Makassar, 22 Maret 2017 M
24 Jumadil Akhir 138 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag.
NIP. 196707141992031005

Pembimbing II



Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.H.I.
NIP. 195601311987011003



Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan

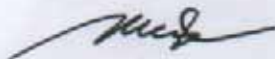
Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Proposal Skripsi saudari Nurul Mu'minati Idris, NIM: 10100113035, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Perbankan Syariah Kabupaten Bone" memandang bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar Proposal) Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

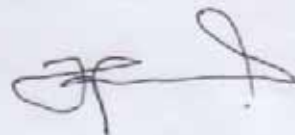
Makassar, 06 Oktober 2016 M
05 Muharram 1437 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag.
NIP. 196707141992031005

Pembimbing II



Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.Hi.
NIP. 195601311987011003

Disetujui Oleh



Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin, M.H.I.

NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Nurul Mu'minati Idris, NIM: 10100113035, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 29 Maret 2017 M
2 Rajab 1438 H

Munaqisy I : Dr. Sohrah, M.Ag.

(.....)

Munaqisy II : Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.

(.....)

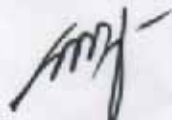
Pembimbing I : Dr. Muh. Sabri AR., M.Ag.

(.....)

Pembimbing II : Drs. Syamsuddin Ranja, M.H.I.

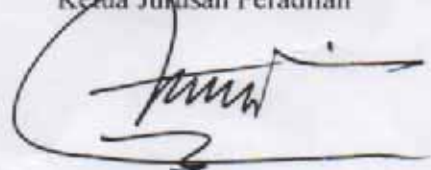
(.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darrussalam, M.Ag.
NIP: 196210161990031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP: 196503021994031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone yang disusun oleh Nurul Mu'minati Idris, NIM: 10100113035, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I.
Munaqisy I	: Dr. Sohrah, M.Ag.
Munaqisy II	: Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D.
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag.
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.H.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003



120161914216227

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 15782/S.01P/P2T/12/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/3093/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL MU MINATI UDRIS**
Nomor Pokok : 10100113035
Program Studi : Peradilan Agama
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIYAAAN MUDRABAH PADA BANK SYARIAH DI WATAMPONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Desember 2016 s/d 29 Maret 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 Desember 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np. 10010513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. Partinggal





**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I: Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Tlp. (0411) 868720, Fax. 864923
Kampus II: Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Tlp. (0411) 841879, Fax. 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 299 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai dosen pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama R.I. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk Saudara : 1. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.
2. Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.Hi.
- Sebagai pembimbing mahasiswa:
- Nama : Nurul Mu'minati Idris
- NIM : 10100113035
- Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Peradilan/HAPK
- Judul Skripsi : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PERBANKAN ISLAM DI KABUPATEN BONE
- b. Melaksanakan pembimbingan skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : Juni 2016

Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003

Tembusan:

Rektor UIN Alauddin Makassar di Makassar (sebagai laporan).

RIWAYAT HIDUP



Nurul Mu'minati Idris, lahir di Poso 21 Juli 1995, lahir dari pasangan orang tua Drs.H.Idris Rasyid dan Dra.Hj.Nurmiati sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara, penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 9 Ta' Tanete Riattang Watampone lalu di tahun 2007 melanjutkan ke MTS Al-Ikhlas Ujung Bone dan MA Al-Ikhlas Ujung Bone dan lulus di Tahun 2013 pada akhirnya dapat menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi selama menjadi mahasiswa, hingga kini penulis masih memiliki dan akan tetap memiliki motivasi dan ketekunan untuk terus belajar ini dibuktikan dengan dapatnya diselesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT serta dapatnya terselesaikan studi dan skripsi ini dengan para pihak yang membantu.